

# SUMPAH PEMUDA DI DALAM PERKEMBANGAN BUDAYA-PO- LITIK INDONESIA 1900 — 1945 SEBUAH IKHTISAR\*

Abdurrachman SURJOMIHARDJO SS

## PENGANTAR

Pertama-tama haruslah dijelaskan, bahwa penulis karangan ini tidak termasuk mereka yang mengalami dan memegang peranan sekitar peristiwa "Sumpah Pemuda 1928". Karangan ini semata-mata merupakan hasil pembacaan belaka, sehingga dalam nada dan pendekatannya akan berbeda dengan apa yang telah tertulis di dalam buku ini.

Berbagai aspek sekitar "Sumpah Pemuda", baik yang berupa kenangan, kesaksian serta pengalaman dalam pergerakan, seperti diungkapkan kembali oleh para saksi serta pemegang peranan, telah mampu menghidupkan kembali "semangat jaman" itu. Dalam bentuknya yang sekarang dapatlah dipandang sebagai sekelumit otobiografi mereka masing-masing, yang dalam penggolongan dokumen-dokumen sejarah termasuk bahan penelitian bagi penulisan sejarah. Nilai otobiografi, apalagi yang komprehensif, sangat besar artinya bagi ilmu pengetahuan, "karena banyak memuat faktor-faktor subjektif seperti segi-segi efektif, motivasi, harapan-harapan, pengalaman serta interpretasi dan konseptualisasi dari individu yang bersangkutan terhadap faktor-faktor itu. Gambaran tentang perkembangan pribadi seseorang mencerminkan keadaan masyarakat yang mengeli-

\* Karangan ini pernah dimuat dalam buku *45 Tahun Sumpah Pemuda* (Jakarta: Yayasan Gedung-gedung Bersejarah Jakarta, 1974), hal. 291-304

linginya, ialah kelompok sosialnya, struktur dari stratifikasi sosial dan sebagainya”, demikianlah seorang sejarawan terkemuka Indonesia dewasa ini dalam menempatkan nilai otobiografi bagi penulisan sejarah.<sup>1</sup>

Karangan ini hanyalah sekedar merupakan ikhtisar, suatu kerangka perkembangan, sebagai suatu cara untuk dapat ”memahami hubungan pergerakan-pergerakan kebangsaan kita dalam jalinan sejarah bangsa”, seperti tercantum dalam surat Ketua Yayasan Gedung-gedung Bersejarah Jakarta kepada penulis karangan ini.<sup>2</sup> Dalam beberapa hal dapat diketengahkan bahan-bahan dokumenter lain sebagai pembanding kenangan serta pengalaman para penulis buku peringatan ini. Tema pokok karangan ini ialah perjuangan pemakaian kata Indonesia dan Bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa, sebagai salah satu aspek perkembangan budaya-politik pada jaman kolonial.

Uraianya beralas kepada kesadaran dan penghayatan sejarah tentang peristiwa sejarah, yang tidak dialami sendiri, tetapi yang dapat diketahui melalui pembacaan kembali kepustakaan dan bahan-bahan dokumenter.

## DARI BAHASA MELAYU KE BAHASA INDONESIA

Perkembangan Bahasa Melayu menjadi Bahasa Indonesia, yang kini menjadi Bahasa Nasional Republik Indonesia, sejak lama telah menjadi bahan pembicaraan luas.<sup>3</sup> Bahasa Melayu

1 Sartono Kartodirdjo, ”Metode Penggunaan Bahan Dokumen”, dalam Koentjaraningrat (red.), *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta 1978, hal. 51-81. Lihat juga Louis Gottschalk, ”The Historian and the Historical Document”, dalam Louis Gottschalk, Clyde Kluckhohn and Robert Angel, *The Use of Personal Documents in History, Anthropology and Sociology*, New York 1945. Terbitan Social Science Research Council, Bulletin no. 53. Bandingkan dengan Koentjaraningrat, ”Metode Penggunaan Data Pengalaman Individu”, dalam Koentjaraningrat (red), *op. cit.*, hal. 185-202.

2 Pak Soediro, tertanggal 30 Januari 1974

3 Periksa S.T. Alisjahbana, *Dari Perjuangan dan Pertumbuhan Bahasa Indonesia*, Djakarta 1957.—, ”The Indonesian Language, By-product of Nationalism”, *Pacific Affairs*, XII, 1949, hal. 388—392. A. Teeuw, *A Critical Survey of Studies on Malay and Bahasa Indonesia*, 's-Gravenhage 1961.

yang aslinya merupakan bahasa kelompok suku-bangsa di kepulauan Indonesia, telah menjadi bahasa perdagangan pada masa lalu di pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia. Di samping itu dipergunakan dalam penyebaran agama Islam dan Kristen.

Pertentangan-pertentangan setempat, yang timbul berhubungan dengan kedatangan pedagang-pedagang Belanda dan berakhir dengan perjanjian-perjanjian dagang maupun politik banyak yang menggunakan bahasa Melayu di samping bahasa Belanda.

Sekolah-sekolah bumiputra yang kemudian didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada mulanya direncanakan untuk memakai bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Tetapi sejak awal abad ke-XX kepentingan daerah jajahan, yang memerlukan tenaga-tenaga rendahan yang mengerti bahasa Belanda menggeser kedudukan bahasa Melayu. Di kota-kota sekolah lebih banyak mengajarkan Bahasa Belanda.<sup>1</sup>

Sebaliknya perkembangan sosial di kota-kota menumbuhkan kelompok elite baru yang amat peka terhadap perubahan. Tanda-tanda pertama kepekaan terhadap perubahan itu dapat dilihat dengan lahirnya organisasi bercorak politik yang mencita-citakan kemajuan dan kemerdekaan bangsa, seperti Budi Utomo, Sarekat Islam dan *Indischë Partij*.<sup>2</sup>

1 I.J. Brugmans, *Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlandsch-Indië*, Batavia-Groningen 1938

2 Mengenai kecenderungan pemikiran para pemimpin Budi Utomo tentang politik dan kebudayaan sampai tahun 1918, lihat studi Dr. Akira Nagazumi, *The Dawn of Indonesian Nationalism. The Early Years of the Budi Utomo, 1908—1918*, Tokyo 1972. Khusus mengenai kegiatan para pelajar di Jakarta dan berita-berita pers menjelang 20 Mei 1908 sampai Kongres BU yang pertama, lihat Abdurrachman Surjomihardjo, "Budi Utomo Cabang Betawi", *Budaya Djaja*, 62 (Juli) 1973, hal. 399—442. Mengenai Sarekat Islam, lihat Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900—1942*, Singapore-Kuala Lumpur 1973, hal. 343—346. Sartono Kartodirdjo telah merekonstruksi kegiatan S.I. lokal, di mana massa

Sangat menarik untuk dicatat laian mengenai bahasa yang dipergunakan di dalam kongres-kongres maupun publikasi organisasi itu. Budi Utomo mempergunakan bahasa Belanda, Jawa dan Melayu. Demikian juga *Indische Partij*, mula-mula menggunakan bahasa Belanda dan Melayu, kemudian setelah menjadi *Nationale Indische Partij*, juga bahasa Jawa dalam surat kabarnya.

Seorang wakil pelajar Indonesia di Nederland, yang telah aktif dalam gerakan nasional, dalam kongres *Indonesisch Verbond van Studeerenden* (Perserikatan Pelajar Indonesia) pada tahun 1918 di Wageningen telah mengusulkan agar bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah Indonesia.<sup>1</sup> Majalah pelajar-pelajar Indonesia di Nederland berjudul *Hindia Poetra*, tetapi isinya dalam bahasa Belanda.

---

pengikut S.I. bergerak. Lihat karangannya *Protest Movements in Rural Java*, Singapore-Kuala Lumpur 1973, hal. 142—185. Kedua studi itu mempergunakan surat-surat kabar dan dokumen pemerintah sebagai sumber. Dokumen pemerintah Hindia Belanda, terutama yang mengenai kegiatan para pemimpin S.I., terdapat dalam penerbitan sumber yang dikerjakan oleh S.L. van der Wal (ed.), *De Volksraad en de Staatkundige Ontwikkeling van Nederlandsch-Indië*, Eerste stuk (1981-1926), Tweede Stuk (1927—1942), Groningen 1965. (selanjutnya S.L. van der Wal, *De Volksraad* ....). Juga S.L., van der Wal (ed.), *De Opkomst van de Nationalistische Beweging in Nederlands-Indië*, Groningen 1967 (selanjutnya S.L. van der Wal, *De Opkomst* ...) *Indische Partij* adalah organisasi golongan Indo (Eurasia) yang berhasil menarik sekelompok cendekiawan Indonesia yang memiliki kecenderungan politik yang kuat dan radikal. Dokumen-dokumen Hindia Belanda mengenai *Indische Partij* termuat secara luas dalam S.L. van der Wal, *De Opkomst* ..., *passim*. Penerbitan I.P. dipakai dalam studi P.W. van der Veur, *Introduction to a socio-political study of the Eurasians of Indonesia*, Ph. D. Thesis Cornell University 1956. Dalam bentuk xerografi kini tersimpan dalam Perpustakaan LRKN-LIPI, Jakarta. Koleksi Perpustakaan Museum Pusat mengenai penerbitan IP telah pula dipergunakan penulis karangan ini. Lihat catatan (2) di bawah.

- 2 Lihat *Indië in de Nederlandsche Studentenwereld. Verslag van het Eerste Congres van het "Indonesisch Verbond van Studerenden"*, gehouden te Wageningen op den 29 sten, 30 sten en 31 sten Augustus 1918. Den Haag 1918. Laporan Kongres itu diterbitkan oleh *Indonesisch Persbureau* yang dipimpin oleh Suwardi Surjaningrat. Ikhtisar pembicaraan mengenai bahasa pengantar dalam kongres itu terdapat dalam Abdurrahman Surjomihardjo, "Suatu analisa cita-cita dan tindak perbuatan nasional revolusioner Suwardi Surjaningrat, 1913—1922", dalam *Medan Ilmu Pengetahuan*, III (April) 1962, hal. 476—480. Terjemahan bahasa Inggris terdapat di dalam *Madjalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia*, III, 1964, hal. 371—406.

Di Indonesia sendiri perkembangan pers berbahasa Melayu dinilai sangat penting peranannya, karena pers itu dapat langsung mencapai pembaca penduduk bumiputra, golongan penduduk yang terbanyak jumlahnya di samping golongan Belanda dan Tionghoa. Pada mulanya pers bahwa Melayu itu adalah milik modal Belanda dan Tionghoa, tetapi tidak jarang redaksinya merupakan campuran. Umumnya ada guru bahasa Melayu yang duduk dalam redaksi, demikian juga pembantu-penulis surat kabar. Peranan pers bahasa Melayu itu menjadi perhatian dua pengarang pertama tentang pers Indonesia, yang menulis dalam tahun 1909.<sup>1</sup>

Sebuah mingguan, yang kemudian menjadi harian, *Medan Prijaji* (1907—1912), merupakan penerbitan yang terpenting dalam rangkaian perkembangan awal pers Indonesia. Bukan saja karena modal dan penerbitnya adalah orang Indonesia, tetapi nada isinya yang jelas menunjukkan kesadaran penggunaan bahasa Melayu sebagai media untuk membentuk pendapat umum mengenai berbagai-persoalan masyarakat dewasa itu. Pemimpinnya R.M. Tirtohadisurjo, kemudian diserahi tugas untuk memimpin surat kabar Sarekat Islam yang pertama dan terkemuka, yaitu *Sarotama* (1914).

1 E.F.E. Douwes Dekker, "The Press", dalam Arnold Wright and T. Breakspear (eds), *Twentieth Century Impressions of Netherlands-India* London-Batavia 1909, hal. 261—268. A. Cabation, "La Presse indigène aux Indes Néerlandaises", dalam *Revue du Monde musulman*, VII, 1909, hal. 485-490. Penyusun pertama sejarah surat kabar Indonesia ialah Sudarjo Tjokrosisworo (ed.), *Kenangan Sekilas Sedjarah Perjuangan Pers Sebangsa*, Djakarta 1958. Pers Indonesia-Tionghwa, yang menggunakan bahasa Melayu Pasar, kedudukan dan peranannya di tengah-tengah perkembangan bangsa Indonesia, terdapat dalam uraian Kwee Kek Beng, "De Chineseche Pers in Nederlandsch-Indië", dalam *Koloniale Studien*, 9 jrg. 1935, hal. 194—224. Lihat juga otobiografi Kwee Kek Beng. *Doea poeloeh lima tahoen sebagai wartawan*, Batavia 1948. Suatu studi pendahuluan yang menyeluruh terdapat dalam Liauw Kian Djoe (Leo Suryadinata), *Pers Indonesia Tionghwa dan Pergerakan Kemerdekaan* (1901—1942). Skripsi Sarjana Jurusan Sejarah. Fakultas Sastra U.I. 1965. Juga dalam Leo Suryadinata, *The Pre-World War II Peranakan-Chinese Press of Java* ....., Ohio University Center for International Studies 1971.

Sejak tahun 1923 elite baru yang terdiri dari mahasiswa Indonesia di Nederland memimpin dan mengarahkan idea Indonesia sebagai pengertian politik dan identitas bangsa. Organisasi mereka berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia dan majalahnya bernama *Indonesia Merdeka*.<sup>1</sup> Kata Indonesia yang semula dikenal mereka dalam kepustakaan etnologi, ditingkatkan sebagai identitas mereka. Sebagai kelanjutan idea identitas Indonesia itu, maka di Indonesia pada tahun 1927 didirikan Partai Nasional Indonesia. Dari namanya saja sudah merupakan identitas politik baru, yang mengatasi pengertian dan batas-batas suku bangsa di Indonesia.<sup>2</sup>

Elite Indonesia baru, yang semula hanya pandai bahasa daerah dan bahasa Belanda, melihat kemungkinan pemakaian bahasa Melayu sebagai alat komunikasi politik. Hal inipun secara bersamaan disadari dan diketahui akan bahayanya oleh pejabat-pejabat Hindia Belanda.

1 Terbit dalam bahasa Belanda, tetapi sejak tahun 1927 telah ada karangan dalam bahasa Indonesia. Pernah pula terbit dalam bahasa Indonesia, tetapi hanya sampai lima nomor. Mengenai Perhimpunan Indonesia dan peranannya dalam pergerakan nasional, periksa Mohammad Hatta, *Verspreide Geschriften*, Djakarta-Amsterdam-Surabaia 1952; dan *Kumpulan Karangan*, I-II, Djakarta-Amsterdam-Surabaia 1953. Lihat juga *Gedenkboek Indonesische Vereeniging 1908—1923; Jubileum Nummer Perhimpunan Indonesia 1908—1938*. Sangat menarik untuk diperhatikan ialah karangan-karangan Suwardi Surjaningrat, "De Indische Vereeniging. een Radicale Hervorming, 1908—1918", di dalam *De Beweging*, 29 Maart 1919, Noto Soeroto, "De Eerste organisatie van Indonesiërs in Nederland". *Indische Gids*, LI, 1929; hal. 238 — 242. Suatu rekonstruksi sejarah berdasarkan pengalaman sendiri dan pembacaan sumber-sumber telah dibuat oleh Prof. Soenario S.H. *Perhimpunan Indonesia dan Peranannya dalam Perjuangan Kemerdekaan kita*, kertas-kerja pada Seminar Sedjarah Nasional II, 26—29 Agustus 1970 di Yogyakarta. Juga Achmad Subardjo Djoyoadisuryo, "Kenang-kenangan akan Saudara Mohamad Hatta", dalam buku *Bung Hatta Mengabdikan pada cita-cita perjuangannya bangsa*, Djakarta 1972, hal. 117—138.

2 David Joel Steinberg dan lain-lain, *In Search of Southeast Asia. A Modern History*, New York 1971, hal. 296. Mengenai PNI dan perkembangannya periksa studi Bernhard Dahm, *Sukarnos Kampf um Indonesiens Unabhängigkeit. Werdegang Und/ Ideen eines asiatischen Nationalisten* (Perjuangan Sukarno untuk kemerdekaan Indonesia. Asalmula dan gagasan seorang nasionalis Asia), Frankfurt am Main-Berlin 1966. Buku Dahm ini telah terbit dalam terjemahan bahasa Belanda (Meppel t.t.) dan Inggris (Ithaca, 1969). Buku ini sangat penting sebagai pembandingan otobiografi Ir. Sukarno, seperti telah dikisahkan kepada Ny. Cindy Adams, yang penyajiannya banyak mengandung kesalahan-kesalahan.

Banyaknya kasus *persdelict* di masa Hindia Belanda, larangan terbit bagi brosur dan pers antara lain karena disadari bahayanya pengaruh tulisan dalam bahasa Melayu dalam pers itu segera dapat dipahami oleh penduduk bumiputra.

Suatu contoh yang terkenal dan diketahui umum ialah terbitnya risalah *Als ik eens Nederlander was* di dalam bahasa Belanda dan Melayu pada tahun 1913, yang segera dilarang untuk diedarkan. Risalah itu diterbitkan untuk mengecam perayaan seratus tahun kemerdekaan Nederland (dari jajahan Perancis), yang akan diadakan di Indonesia (yang masih dijajah Belanda).

Demikianlah beberapa peristiwa sebelum diadakannya Kongres Pemuda Indonesia ke-II di Jakarta.

### GEMA "SUMPAH PEMUDA INDONESIA RAYA"

Dalam hubungan karangan ini, keputusan Kongres Pemuda ke-II itu, bahwa "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia" merupakan perumusan yang tepat sekali dari kesadaran yang secara lambat berkembang pada tahun-tahun sebelumnya.

Sejak itu penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai kesempatan sejalan dengan kesadaran identitas Indonesia. Latarbelakang budaya dan sosial pemakai bahasa itu tercermin dalam karangan-karangan mereka. Karya Sastra Indonesia sebagai hasil "arsitek-arsitek bahasa Indonesia", baik sebagai terbitan Balai Pustaka maupun di luarnya menuju ke arah kesempurnaan penggunaan Bahasa Indonesia. *Poedjangga Baroe* yang terbit sejak tahun 1933 merupakan cermin kegiatan intelektual elite baru dan dengan sadar menggunakan Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi modern di tengah-tengah perkembangan ilmu dan teknologi. <sup>1</sup>

1 Mengenai karya sastra Indonesia modern, lihat karangan-karangan Alisjahbana, Armijn Pane dan H.B. Jassin. Bibliografi karya mereka terdapat dalam buku A. Teeuw, *Modern Indonesian Literature*, The Hague 1967. Juga dalam Ajip Rosidi, *Ichtisar Sedjarah Sastra Indonesia*, Bandung 1969, hal. 224—238.

## ANALISA

Gerakan pendidikan Taman Siswa, yang oleh banyak orang disebut, "mulai perjalanan hidupnya yang aneh itu dengan aksi untuk melindungi kebudayaan Jawa", sejak tahun 1930 para pemimpinnya "telah meninggalkan cita-citanya dan menerima prioritas kepentingan Bahasa Indonesia".

Demikian juga Perguruan Rakyat di Jakarta, yang para pendirinya berasal dari berbagai daerah Indonesia, corak dan tujuan ke-Indonesiaannya nampak benar. <sup>1</sup>

Sebuah Kongres Bahasa diadakan di Surakarta pada tahun 1938. Keputusan-keputusannya yang penting ialah gagasan untuk mendirikan sebuah lembaga dan sebuah fakultas untuk mempelajari bahasa Indonesia. Di samping itu membuat tata-bahasa baru sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam struktur bahasa. Bahasa Indonesia hendaklah dipakai sebagai bahasa Hukum dan sebagai alat pertukaran pikiran di dalam dewan-dewan perwakilan waktu itu. Tetapi keputusan itu hanya ada di atas kertas dan tidak satu lembagapun yang didirikan untuk melaksanakan keputusan kongres itu.

Dalam pada itu pers dan majalah yang mewakili ideologi agama, politik maupun kebudayaan terbit terus dengan bahasa Indonesia yang makin sempurna. Tiga tahun setelah "Sumpah Pemuda" Sutan Takdir Alisjahbana dalam majalahnya kaum wartawan (dahulu bernama jurnalis) menulis tentang peranan pers Indonesia sebagai berikut:

"Dalam waktoe bangsa kita dalam segala djoeroesan baharoe moelai bangoen dan bergerak seperti sekarang ini, ta' adalah sesoeatoe yang lebih besar pengaroehnya dari pers. Dalam doenia bahasa poen tiada terketjoeali. Soerat kabar, madjallah yang tiap hari beriboe-riboe berserak seloeroeh kepoelaoean

---

<sup>1</sup> Mengenai Taman Siswa lihat W. le Fèbre, *Taman Siswa ialah kepertjajaan kepada kekuatan sendiri untuk tumbuh .....*, Djakarta-Surabaya 1952. Ki Hadjar Dewantara, *Karya K.H.D.* (Kumpulan Karangan), Jilid I-II, Jogjakarta 1962—1967; *Buku Peringatan Taman Siswa 30 tahun*, Jogjakarta 1952.

Indonesia ini, lambat laoen mempengaruhi bahasa yang dipakai oleh beriboe-riboe ra'jat Indonesia. Dan karena pada oemoemnya soerat kabar dan madjallah itoe dibatja orang yang agak terpeladjar, yang boleh mempengaruhi poela atas sekelilingnya, maka njata sekali, bahwa pengaruh pers atas toemboehnya bahasa Indonesia, sangat besar, ja, boleh djadi jang paling besar sekali pada waktoe ini. Bahasa jang dipakai dan disebarkan pers itoe, perlahan-lahan, toeroen meresap kepada ra'jat yang oemoem".

Lebih lanjut ia menulis "Soempah pemoeda-pemoeda bangsa kita beberapa tahoen yang laloe, bahwa mereka hanja mengakoei *satoe* bahasa jaitoe *bahasa Indonesia*, ialah sesoetoe kedjadian yang penting dalam sedjarah Indonesia, jang hanja kelak akan dapat dihargai oleh ahli sedjarah dengan sepenoeh-penoehnya. Tetapi dalam pada itoe, bagi kita jang menjetoedjoei dan memoedji soempah itoe, teranglah terpikoel soetoe kewadajiban jang berat, tetapi soetji, oentoek beroesaha bersamasama, mengangkat deradjaat bahasa jang *satoe* itoe, menyoeboerkan dan menyempoernakannja agar dapat ditandingkan dengan bahasa mana sekalipoen di moeka boemi ini".<sup>1</sup>

Sangat menarik pula untuk diperhatikan ialah rangkaian polemik tentang kebudayaan Indonesia antara tahun 1935-1939, yang telah dilakukan oleh seorang sarjana hukum dan sasterawan (S.T. Alisjahbana), dua orang dokter dan politikus (Dr. Sutomo dan Dr. M. Amir), dua orang wartawan (Adinegoro dan Tjindarbumi), seorang guru dan sasterawan (Sanusi Pane), seorang sarjana ahli peneliti sejarah dan kebudayaan Indonesia kuna (Dr. Poerbatjaraka) dan akhirnya seorang politikus, pendidik dan budayawan (Ki Hadjar Dewantara), dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta gaya masing-masing.<sup>2</sup>

1 Lihat majalah *Djoernalis. Orgaan Opisil dari Perserikatan Kaoem Journalist*, Jrg. I, No. 1 (November) 1931, hal. 8. Hanya satu nomor saja yang terbit. Komisi Redaksi terdiri dari Saeroen, Parada Harahap dan J. Manoppo. Mengenai berdirinya Perserikatan Kaoem Journalist itu lihat laporan Lauw Botak Sr. *Ratoe Doenia atawa beberapa hal yang penting dalem Congres Journalisten Indonesia. Jang dibikin koetika ddo. 8—9 Agustus '31 di Semarang*. Semarang 1931.

2 Achdiat K. Mihardja, *Polemik Kebudayaan*, Djakarta 1948. Telah dicetak ulang berkali-kali.

Di dalam *Volksraad* (Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda), Fraksi Nasional di bawah pimpinan Mohamad Husni Thamrin, abang Betawi yang telah menjadi salah seorang pemimpin politik terkemuka waktu itu, melancarkan aksi menggunakan Bahasa Indonesia di dalam pidato-pidato di muka sidang. Itu terjadi pada tanggal 12 Juli 1938.<sup>1</sup> Reaksinya cukup hebat, baik di dalam maupun di luar *Volksraad*. Itulah usaha pertama untuk mendobrak penggunaan Bahasa Belanda di dalam perwakilan dan sebagai bahasa Hukum selama itu. Bila kita baca dokumen-dokumen waktu itu, maka adanya keberatan pejabat-pejabat Hindia Belanda berhubung aksi-aksi Fraksi Nasional itu antara lain karena dengan menggunakan bahasa itu makna dan arti perdebatan-perdebatan di dalam *Volksraad* akan segera dipahami oleh pers Indonesia dan rakyat umum.

Di jaman pendudukan Jepang terjadi perkembangan yang penting. Salah satu tindakan Jepang yang pertama ialah meniadakan Bahasa Belanda. Bahasa Jepang tidak dikenal, oleh karena itu pemerintah pendudukan terpaksa menetapkan penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, di kantor-kantor pemerintah dan di sekolah-sekolah.

Kesempatan berkembang semacam itu belum pernah terjadi sebelumnya. Bahasa Indonesia berkembang ke segala jurusan dan untuk pelbagai keperluan. Sebuah Komisi Bahasa didirikan dan jasanya yang terutama ialah: berhasil menetapkan istilah-istilah baru, membuat sebuah tatabahasa normatif dan menetapkan kata-kata baru dalam penggunaan bahasa sehari-hari.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menutup proses perkembangan itu, sebaliknya membuka kemungkinan-kemungkinan yang lebih luas bagi perkembangan bahasa nasional kita.<sup>2</sup>

1 S.L. van der Wal, *De Volksraad* ....., Tweede Stuk, hal. 369 — 376

2 A. Teeuw, *op. cit.* (lihat catatan 3 hal. 770). Suatu studi dengan pendekatan sosiologi tentang perkembangan Bahasa Indonesia ialah dari A.A. Bodenstedt, *Sprache und Politik in Indonesien*, Heidelberg 1966.

## NAMA INDONESIA SEBAGAI IDENTITAS BANGSA

Pada bagian-bagian lain buku ini para pembaca mendapat gambaran dari para pelaku sejarah dan saksi-saksi peristiwa bersejarah tentang perjuangan ke arah kemajuan, penghapusan kemiskinan, penderitaan dan usaha-usaha mengatasi keterbelakangan dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan. Penulis karangan ini ingin mengulang kembali kisah perjuangan sebuah nama, yang bagi rakyat jajahan pun perlu diperjuangkan. Sungguhpun untuk sebuah nama, yaitu Indonesia, namun dapatlah dikemukakan di sini justru nama itulah yang menjadi tujuan luhur, dengan arti dan maknanya yang berhasil menjiwai kaum nasionalis, dan kemudian juga diikuti oleh pelbagai golongan masyarakat di Indonesia.

Untuk mengikuti perkembangan itu kita menengok kembali ke belakang, yaitu berhubung dengan penerbitan pertama majalah *Indonesia Merdeka*, diterbitkan oleh Perhimpunan Indonesia di Nederland. Dalam nomor pertama tahun 1924, majalah itu mencatat dalam kata-pengantarnya:

”Kita memasuki tahun baru dengan pakaian baru dan nama baru. Pergantian nama itu bukanlah merupakan hasil khayalan secara tiba-tiba, tetapi hanya merupakan penarikan sebuah garis, yang dimulai dengan perubahan *Indische Verreniging* menjadi *Indonesische Vereeniging*”.<sup>1</sup>

Di dalam nomor pertama itu dicatat, bahwa ”*Indonesia Merdeka* merupakan suara Indonesia Muda yang sedang belajar, suara yang pada waktu ini mungkin tidak terdengar oleh penguasa, tetapi yang pada suatu waktu pasti akan didengar ..... Adalah merupakan suatu kesalahan untuk menganggap remeh suara itu, sebab di belakang suara itu berdiri kemauan pasti, untuk tetap merebut kembali hak-hak, cepat atau lambat untuk

1 Teks asli dalam bahasa Belanda. *Indonesia Merdeka*, 2e jrg., No. 1 (Maart) 1924. ”Voorwoord” (Kata Pengantar).

## ANALISA

menetapkan kedudukan atau keyakinan di tengah-tengah dunia, yaitu Indonesia Merdeka.”

Peristiwa pergantian nama itu dan perjuangan untuk mengganti nama *Nederlandsch-Indie* menjadi Indonesia telah dicatat oleh penyusun pertama Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia, J. Th. Petrus Blumberger.<sup>1</sup> Ia mencatat, bahwa sekitar tahun 1925 banyak organisasi yang berorientasi nasional memakai nama Indonesia dan ingin memberi isi politik ketatanegaraan ke dalam nama itu.

Pemakaian nama Indonesia sejak itu secara luas terdapat pada nama-nama surat kabar, organisasi dan judul karangan. Judul-judul seperti *Indonesia in de wereldgemeenschap* (Indonesia di tengah-tengah pergaulan dunia), *Indonesia di tengah-tengah Revolusi Asia* dan *De Vakvereeniging in Indonesia* (Serikat sekerdja di Indonesia) termuat dalam nomor lustrum 15 tahun berdirinya *Indische Vereeniging*, (1908-1923).

Nazir Dt. Pamuntjak, sebagai wakil P.I. di dalam Kongres Anti Imperialisme dan Kolonialisme di Brussel (10-15 Pebruari 1927) berpidato dengan judul *Indonesia en de Vrijheidsstrijd* (Indonesia dan perjuangan kemerdekaan). Nama Indonesia yang dipakainya itu dijelaskan kepada para pengunjung kongres sebagai berikut:

”Indonesia adalah kepulauan Hindia, terdiri dari Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan banyak pulau-pulau kecil lainnya dengan jumlah penduduknya sebanyak 50 juta.”<sup>2</sup> Di dalam majalah yang sama terdapat artikel yang menguraikan asal-usul pemakaian nama Indonesia, sejak dipakai oleh J.R. Logan dalam arti geografis (1850), kemudian dalam arti ethnolo-

---

1 J.Th. Petrus Blumberger, *De Nationalistische Beweging in Nederlandsch-Indië*, Haarlem 1931.

*Indonesia Merdeka*, 5e jrg. no. 1—2 (Maart—April) 1927, hal. 21

gis sejak A. Bastian (1884) dan kemudian dalam arti politik ketatanegaraan oleh kaum nasionalis Indonesia. Karangan itu merupakan uraian lebih lanjut dari karangan Kreemer dalam majalah *Het Koloniaal Weekblad*,<sup>1</sup> yang mempersoalkan dari mana asal nama Indonesia itu.

## PERGERAKAN NASIONAL DAN NAMA INDONESIA

Sejak awal pergerakan nasional terasa perlunya untuk memakai sebuah kata yang menunjukkan tujuan pokok pergerakan, yaitu pembinaan bangsa dan wilayah Bangsa. Perkumpulan-perkumpulan yang bercorak kedaerahan pada mulanya tak merasa perlu mencari kata pemersatu itu. Tetapi sekali perkumpulan itu mengatasi batas-batas asal kedaerahan, maka menjadilah masalah untuk mencari penamaan yang tepat bagi organisasinya.

Demikianlah dapat kita catat, tatkala para mahasiswa di Nederland itu pada tahun 1908 akan mendirikan perkumpulannya, R.M. Noto Suroto mengusulkan nama Budi Utomo Cabang Nederland. Tetapi hal itu ditolak oleh dokter Apituley dari Ambon, karena BU bercorak kejawaan dan para mahasiswa tidak semuanya berasal dari Jawa. Ditetapkanlah kemudian nama *Indische Vereeniging* bagi perkumpulan itu.<sup>2</sup> Kaum Indo di Indonesia, menamakan organisasinya *Insulinde*, nama yang telah dipakai oleh Multatuli dalam abad ke-XIX. Waktu mereka mendirikan partai politik bersama dengan golongan lain di Indonesia, maka partainya bernama *Indische Partij*, sedang

- 1 "Waar Komt de naam Indonesië vandaan?", *Het Koloniaal Weekblad*, 3 Februari 1925, hal. 4. Bung Hatta dalam sumbangan karangan bagi buku ini mencatat kenangannya mengenai karangan Prof. van Volenhoven, *De Indonesiër en zijn grond* (Orang Indonesia dan tanahnya) yang menjadi landasan *Indische vereeniging* dalam tahun 1921 memakai kata *Indonesiër* dan Indonesia. Lihat juga *Indonesia Merdeka*, 5e jrg. no. 1—2 (Maart—April) 1927, hal 50—53 yang telah memuat karangan "Iets over den naam Indonesia". Bung Hatta sendiri menulis tiga artikel mengenai penggunaan, pemakaian dan perjuangan nama *Indonesia*, lihat *Verspreide Geschriften*. Djakarta-Amsterdam-Surabaya 1952, hal. 343-352.
- 2 Dalam *Soebangsih Gedenkboek Boedi Oetomo: 1908 — 20 Mei — 1918*. Amsterdam 1918. Noto Soebroto telah melepaskan gagasannya dan ia mengusulkan kata *Indonesiers*. Lihat karangan Suwardi Surjaningrat tersebut dalam catatan (1) hal. 774.

konsep kewarganegaraannya dinamakan *Indiërs* atau Kaum Hindia.

Dalam artinya yang terbatas dan belum jelas, kata-kata *Indonesië* — *Indonesisch* dan *Indonesiër* makin banyak dipakai. Demikianlah tercatat R.M. Suwardi Suryaningrat mendirikan sebuah biro pers di Nederland dengan nama *Indonesisch Pers-bureau* pada tahun 1913.<sup>1</sup> Dr. Ratulangi diberitakan mendirikan sebuah kantor asuransi di Bandung dengan nama Asuransi Indonesia.<sup>2</sup> Kata Nusantara, yang berasal dari buku Negara-kertagama karangan Mpu Prapanca dari jaman Majapahit, digemari pula oleh kaum nasionalis seperti Ki Hadjar Dewantara dan Sanusi Pane.

Dari semua itu, maka Perhimpunan Indonesia di Nederland yang melantingkan kata Indonesia dalam arti Politik-ketatanegaraan. Perumusannya tertuang dalam sebuah artikel di dalam majalahnya, dengan singkat dan jelas: "Indonesia sama artinya dengan *Nederlandsch Indië*, sebagai pengertian ketatanegaraan bagi *negara* Indonesia yang akan datang. Indonesia tidak hanya berarti telah tercapainya tujuan, tetapi kesatuan, kekuasaan untuk mewujudkan diri sendiri".<sup>3</sup>

Sambutan atas propaganda P.I. ialah dipakainya kata Indonesia oleh semua partai politik dan perkumpulan. Pemuda mengadakan Kongres-kongres dan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta, dicanangkanlah Trilogi Sumpah Pemuda yang kini terkenal itu, nama INDONESIA dikaitkan dengan tujuan luhur mereka dalam usaha membina Bangsa yang satu, Tanah Air yang satu dan Satu Bahasa Persatuan.

Masa depan Indonesia Merdeka juga menjadi perspektif guru-guru besar Belanda di (Perguruan Tinggi Hukum) *Rechts-hoge School* di Jakarta. Pandangan mereka semula akan dise-

1 Ki Hadjar Dewantara, *Dari Kebangunan Nasional sampai Proklamasi Kemerdekaan* Djakarta 1952, hal. 97—104.

2 W.S.T. Pondaag, *Pahlawan Kemerdekaan Nasional Mahaputra Dr. G.S.S.J. Ratulangi*, Surabaya 1966

3 *Indonesia Merdeka*. 5e jrg., no. 1—2 (Maart—April) 1927, hal. 52

barluaskan melalui majalah *De Stuw* (Pendorong). Tetapi dalam masa Gubernur Jendral De Jonge, majalah dan kelompok yang menerbitkan *De Stuw* mengundurkan diri dengan sukarela dari panggung sejarah. Alasannya antara lain untuk tidak membahayakan masa depan para penyumbang karangan yang masih muda dan belum mempunyai kedudukan pasti di dalam masyarakat. Prof. Resink, kini menjadi profesor riset pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengungkapkan, bahwa adanya perbedaan marjinal dari satu huruf saja antara istilah ilmu pengetahuan "Indonesië" dan istilah politik "Indonesia" dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan pada waktu itu.<sup>1</sup>

Meskipun demikian usaha-usaha pemakaian kata Indonesia dalam arti politik-ketatanegaraan berjalan terus. Di dalam *Volksraad*, seperti telah disebutkan di muka, Thamrin dengan Fraksi Nasional mengumumkan akan mempergunakan Bahasa Indonesia dalam sidang-sidang. Maksud Fraksi Nasional itu mendapat perhatian *Raad van Indië* (Dewan Penasihat Gubernur Jendral), yang dalam suratnya tertanggal 1 Juli 1938 kepada Gubernur Jendral memperingatkan, bahwa maksud Thamrin akan menimbulkan kesulitan-kesulitan politik yang dapat menjurus ke arah keadaan gawat. Penggunaan Bahasa Indonesia (dalam teks surat masih disebut *het Maleisch*), karena sifatnya (menurut *Raad van Indië*) akan mempunyai arti propaganda bagi pergerakan nasional dan hal itu akan merupakan langkah pertama ke arah penggunaan bahasa itu secara luas di dalam *Volksraad*. Pidato-pidato yang diucapkan dalam Bahasa Indonesia secara harafiah akan mendapat tempat di dalam pers Indonesia. Sulitlah bagi Ketua *Volksraad* untuk mengontrol pernyataan-pernyataan dan pandangan-pandangan politik yang tidak disukai di dalam pidato-pidato *Volksraad*.<sup>2</sup>

Dari usul penggunaan Bahasa Indonesia, ternyata anggauta-anggauta Indonesia dalam *Volksraad* mengaitkan diri dengan

1 G.J. Resink, *Indonesia's History Between the Myths. Essays in Legal History and Historical Theory*, The Hague 1968. hal. 17. Mengenai kelompok *De Stuw* lihat karangan E.B. Locher-Scholten, "De Stuw, tijdstekening en teken des tijds". *Tijdschrift voor Geschiedenis*, 84e jrg., Afl. 3. 1971, hal. 36 dan seterusnya

2 lihat catatan (2) hal. 778

## ANALISA

keputusan-keputusan Kongres Bahasa di Surakarta yang telah diadakan pada tanggal 1 Juni 1938.

Dari usul penggunaan Bahasa Indonesia, anggota-anggota Indonesia di dalam *Voksraad* meningkatkan perjuangannya ke dalam mosi-mosi ketatanegaraan, yang terkenal sebagai mosi-Wiwoho, mosi-Sutardjo dan mosi-Thamrin. Ketiga mosi itu berturut-turut ikut ditanda-tangani oleh Sukawati dan Kasimo, Sukawati-Thamrin dan Mulia, dan yang ketiga oleh Sutardjo dan Sukawati. Pada pokoknya di dalam ketiga mosi itu tercantum usul perlunya perubahan ketata negaraan dan kewarganegaraan Hindia (*Indisch Burgerschap*). Di dalam mosi-Thamrin jelas dicantumkan agar kata-kata *Nederlandsch-Indië* dan *Inlander* dihapuskan dari semua peraturan-peraturan dan undang-undang dan lain sebagainya dan diganti dengan *Indonesia*, *Indonesiër* dan *Indonesisch*. Itu terjadi pada tahun 1940.

Sudah barang tentu pemerintah Hindia Belanda menolak mosi-mosi tersebut, bahkan menutup kemungkinan pertukaran pikiran lebih lanjut di dalam *Volksraad* bila usaha-usaha perubahan di dalam mosi dimaksudkan untuk mencapai kemerdekaan politik. Dalam pada itu perang melanda Eropa, disusul dengan Perang Pasifik. Baru setelah meletusnya Revolusi Indonesia pada tahun 1945, istilah Indonesia resmi mendapat arti politik-ketatanegaraan, baik secara nasional maupun internasional, dan itu merupakan hasil perjuangan pergerakan kemerdekaan.

## PENUTUP

Dari uraian tersebut di atas, meskipun berupa sebuah ikhtisar kerangka perkembangan, kedudukan peristiwa sejarah pada bulan Oktober 1928 jelas merupakan mata-rantai yang menyambungkan masa lampau dan harapan-harapan masa depan. Dari pemakai Bahasa Melayu, yang semula terbatas pada suku-bangsa, lambat laun menjadi bahasa golongan masyarakat yang silih berganti muncul dan berkembang sepanjang sejarah Indonesia.

## SUMPAAH PEMUDA DALAM SEJARAH BUDAYA—POLITIK

Dari bahasa pergaulan kemudian menjadi bahasa untuk menyebarkan agama, bahasa untuk perdagangan, bahasa perjanjian dagang dan politik, bahasa pers, bahasa dalam kesusasteraan. Kemudian golongan pemuda terpelajar menetapkan sebagai bahasa pembinaan nasion, yang disambungkan dengan nama Indonesia.

Apa artinya usaha-usaha itu dalam keadaan hubungan kolonial, di dalam wilayah yang begitu luas sungguh tak terkirakan. Belum lagi bila dilihat dari jumlah pulau-pulau dan daerah-daerahnya yang dipisahkan oleh hutan-hutan, gunung-gunung dan lautan, sehingga kurang lebih 250 dialek terdapat di negeri kita.

Dokumen-dokumen yang mengawetkan usaha-usaha tersebut kini perlulah digali, dan kalau perlu diterbitkan kembali, sehingga dapat tersebar dan dipergunakan oleh kalangan yang lebih luas. Suatu pembacaan yang dilakukan sekarang dapat memperoleh pengetahuan tentang gaya, isi, motivasi, lingkungan sosial serta pengaruh kekuatan-kekuatan sosial lain yang tumbuh pada awal abad ke-XX di Indonesia.

Secara keseluruhan dapatlah diperoleh data yang bertalian dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Dari suatu kerangka perkembangan tersebut di atas, yang masih perlu dianyam dengan data yang berasal dari para pelaku dan saksi peristiwa sejarah, sudah dapat ditarik kesimpulan: Sejarah perjuangan Bahasa Indonesia dan Nama Indonesia merupakan salah satu saluran perkembangan nasional, terutama dalam usaha pembinaan nasion Indonesia.<sup>1</sup>

---

1 Berbagai segi lain dalam proses itu telah dijadikan pokok-pokok disertasi Dr. Harsja W. Bachtiar, *The Formation of the Indonesian Nation*, Harvard University, Cambridge-Massachusetts 1972. Dalam bentuk naskah disertasi itu dapat dibaca pada Perpustakaan Museum Pusat di Jakarta. Harsja W. Bachtiar memperhatikan kedudukan dan peranan pranata sosial, terutama pranata pendidikan jaman Hindia Belanda dalam proses *pembentukan bangsa* (nation formation). Karangan saya di atas adalah suatu tinjauan perkembangan sejarah dilihat dari proses bertumbuhnya gagasan dan kegiatan ke arah *pembinaan bangsa* (nation building).

## CATATAN TAMBAHAN

Karangan di atas disiapkan lima tahun yang lalu dan merupakan bagian dari suatu kerangka teoretis untuk penulisan yang mencakup tema komunikasi sosial dan pendidikan pada awal abad ke-XX (1900-1945). Sasaran pokok telaah mencakup tiga segi perkembangan masyarakat melalui jalur pendidikan,<sup>1</sup> bahasa dan pers Indonesia<sup>2</sup> dalam proses menuju integrasi nasional. Ketiga jalur perkembangan itu, di samping jalur-jalur yang lain, berada di tengah-tengah suasana keadaan gerakan pembaruan masyarakat budaya, dari suasana keadaan masyarakat kolonial menuju masyarakat merdeka.

Setelah karangan di atas selesai telah timbul berbagai telaah mengenai soal-soal yang bersangkutan-paut dengan tema tersebut di atas<sup>3</sup> atau data baru yang diungkapkan oleh para pelaku sejarah,<sup>4</sup> yang lima tahun yang lalu tidak diketahui penulis karangan ini. Demikianlah tidak disinggung dalam karangan ini kedudukan dan peranan pers pemuda (waktu itu disebut *jeugd pers*), perbincangan gagasan kesatuan dan persatuan bangsa dalam Kongres Pemuda Ke-I (1926), pengaruh organisasi

1 Abdurrachman Surjomihardjo, "Cita-cita Demokrasi Dalam Pendidikan Bangsa: Sebuah Tinjauan Historis," *Prisma*, no. 2, Februari 1977, hal. 76-84

2 Abdurrachman Surjomihardjo, *The Indonesian Press 1900-1942*, kertas kerja untuk Kongres ke-VI Perhimpunan Sejarahwan Asia, Yogyakarta 1974

3 A.I. mengenai asal usul dan pemakaian kata Indonesia, Russel Jones, Earl, Logan and Indonesia, *Archipel*, 6, 1973, hal 93-118. Akira Nagazumi, "Indonesia" dan "Orang-orang Indonesia". Semantik dalam Politik, dalam S. Ichimura dan Koentjaraningrat (redaksi), *Indonesia. Masalah dan Peristiwa. Bunga Rampai*, P.T. Gramedia, Jakarta 1976, hal 1-25. Karangan itu semula dimuat dalam *Asian Profile*, August 1973, hal 91-102

Tentang perkembangan gagasan kesadaran nasional di antara para pelajar Indonesia di Nederland lihat Harsja W. Bachtiar, "The Development of Common National Consciousness Among Students from the Indonesian Archipelago in the Netherlands," *Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia*, Mai 1976, Jilid VI, No. 2, hal. 31-44. Leo Suryadinata, "Indonesia Nationalism and Pre-war Youth Movement. A Re-examination," *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. IX, No. 1, March 1978, hal 99-114. Karangan Suryadinata terutama berdasar sumber-sumber sekunder, sehingga terdapat beberapa kekeliruan detail, namun sebagai kerangka perkembangan gerakan pemuda antara konsensus dan konflik sangat menarik untuk diperhatikan.

4 Periksa karangan-karangan para pelaku sejarah dalam *45 Tahun Sumpah Pemuda*, Yayasan Gedung-gedung Bersejarah Jakarta, 1978

*Jong Indonesië*, kemudian menjadi *Pemuda Indonesia*, dan *Perhimpunan Pelajar-pejajar Indonesia* (PPPI), yang mendorong Kongres Pemuda Ke-II (1928). Segi-segi terakhir ini telah dimuat dalam karangan saya (secara garis besar) dalam surat kabar *Kompas*, 24 Oktober 1978 (hal. IV dst.), berjudul "Ikrar, Putusan dan Sumpah Pemuda".

Satu hal perlu dilengkapkan di sini, yaitu mengenai pemakaian istilah "Sumpah Pemuda", ternyata sebelum Takdir Ali-sjahbana (lihat catatan hal. 777) istilah itu telah dipakai oleh Jusupadi (Danuhadiningrat) sebagai penulis I Komisi Besar Indonesia Muda, yang telah membacakan Berita Komisi Besar dalam "kerapatan besar" Indonesia Muda pada tanggal 31 Desember 1930 di Surakarta sbb.: "*Tanggal 29 Oktober bolehlah kita berkata:*

*Dari Djakarta,  
Moelailah kemenangan kita  
Boekankah diitoe hari lahir lagoe Indonesia Raja, lagoe  
yang kita akoei sebagai lagoe kebangsaan?  
Boekankah diitoe hari kita poetri dan poetra Indonesia  
bersoempah: ....."*<sup>1</sup>.

Dari data itu maka pemakaian istilah sumpah telah menjadi pembicaraan para pemuda yang duduk dalam Komisi Besar Pemuda Indonesia, yang bertekad untuk melaksanakan peleburan organisasinya dalam satu wadah kesatuan dan persatuan menjelang Kerapatan Besar Pemuda tersebut di atas.

Mengenai berbagai segi sebelum dan sesudah Kongres Pemuda Ke-II, suatu *Bunga Rampai Soempah Pemoeda 50 Tahun* telah pula diterbitkan oleh Yayasan Gedung-gedung Bersejarah Jakarta (Dicetak dan diedarkan oleh PN Balai Pustaka, Jakarta 1978).

---

1 *Kerapatan Besar Pemoeda Indonesia yang ke-I, 29 Desember 1930-2 Januari 1931 di Soerakarta*, hal. 56